

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH

Syafrin Umar Osi¹⁾, La Ode Asrun Azis R²⁾, *Firdaus³⁾

1,2,3) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*Email Korespondensi: firdaus.daus6666@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan kebijakan menurunkan angka *stunting* dari 23,5% (2021) menjadi 14,4% (2024). Analisis efektivitas kebijakan mengidentifikasi tiga faktor kunci penentu keberhasilan: (1) koordinasi lintas sektor yang terstruktur antara dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai faktor dominan; (2) sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis data *real-time* yang memungkinkan penyesuaian program secara responsif; dan (3) pemberdayaan kader posyandu sebagai ujung tombak implementasi di tingkat *grassroots*. Program penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan menjadi instrumen utama kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan *stunting* tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi lebih pada kualitas sinergi kelembagaan dan kapasitas implementasi di level operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan *stunting* terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain.

Kata Kunci: efektivitas kebijakan, *stunting* terintegrasi, koordinasi lintas sektor, *triangle coordination*, *governance network*

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of integrated *stunting* reduction interventions in Lakudo Sub-district, Central Buton Regency, based on the policy framework outlined in Regent Regulation No. 39 of 2020. The research methodology employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques comprising observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The findings demonstrate the policy's success in reducing *stunting* prevalence from 23.5% (2021) to 14.4% (2024). The policy effectiveness analysis identified three key determinants of success: (1) structured cross-sectoral coordination among health, education, and social affairs departments as the dominant factor; (2) real-time data-based monitoring and evaluation systems enabling responsive program adjustments; and (3) empowerment of posyandu (integrated health post) cadres as the spearhead of grassroots implementation. Nutritional education programs, child growth and development monitoring, and supplementary feeding for vulnerable groups constitute the primary policy instruments. The findings indicate that *stunting* policy effectiveness depends not solely on budget availability, but rather on the quality of institutional synergy and implementation capacity at the operational level. This research contributes to the development of an integrated *stunting* policy implementation model that can be replicated in other regions.

Keywords: policy effectiveness, integrated stunting intervention, cross-sectoral coordination, triangle coordination, governance network

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat kekurangan nutrisi berkepanjangan, yang terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 24 bulan (2019). Kondisi ini termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dalam jangka waktu lama, terutama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi (Susilawati, 2023). *Stunting* dapat mulai terjadi sejak janin dalam kandungan dan baru tampak saat anak mencapai usia dua tahun.

Indonesia masih menghadapi prevalensi *stunting* yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Penurunan *stunting* perlu dilakukan sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang yang merugikan, seperti gangguan tumbuh kembang dan penurunan fungsi otak yang berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis di masa dewasa, serta penurunan produktivitas (Purba, 2019). Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga yang terbatas, menjadi faktor utama yang mempengaruhi *stunting* (Nisa, 2018).

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menanggulangi masalah ini, meliputi intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menetapkan prioritas kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI), termasuk pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan calon pengantin dan pasangan usia subur, serta surveilans keluarga berisiko *stunting*.

Kabupaten Buton Tengah, khususnya Kecamatan Lakudo, menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan *stunting*. Data menunjukkan prevalensi *stunting* di Kecamatan Lakudo mencapai 23,5% pada tahun 2021, angka yang masih berada di atas target nasional. Kondisi geografis kepulauan dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis terlatih, dan keterbatasan ekonomi menjadi tantangan khusus dalam menurunkan angka *stunting* di wilayah ini (Firdaus et al., 2024). Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang didominasi sektor pertanian dan perikanan subsisten, serta tingkat pendidikan yang relatif rendah, turut mempersulit upaya pencegahan *stunting*.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Dalam pasal 2, peraturan ini mengatur strategi penurunan *stunting* yang meliputi pendekatan lima pilar: komitmen dan visi kepemimpinan; kampanye dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi koordinasi program pusat, daerah, dan desa; gizi dan ketahanan pangan; serta pemantauan dan evaluasi. Fokus utama program ini adalah 1000 hari pertama kelahiran, mulai dari ibu hamil hingga anak berusia dua tahun, termasuk kelompok balita, remaja, dan calon pengantin.

Kebijakan ini bertujuan mempercepat penurunan prevalensi *stunting* dan menjadikan pencegahan *stunting* sebagai prioritas di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku publik (Riyadh et al., 2023). Respon masyarakat terhadap kebijakan ini dinilai sangat positif dan mendukung pelaksanaan program di Kabupaten Buton Tengah.

Meskipun program percepatan penurunan *stunting* yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah telah berjalan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Menurut Nurak et al. (2023), salah satu kendala utama adalah wilayah operasional yang luas, kurangnya pendampingan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta masalah kemiskinan (Poeh & Tandean, 2024). Supriyanto & Jannah (Supriyanto & Jannah, 2022) menyatakan bahwa keberhasilan program penurunan *stunting* masih terbatas oleh rendahnya tingkat integrasi kebijakan. Upaya konvergensi belum mencapai tingkat integrasi yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan instrumen kebijakan untuk mewujudkan integrasi yang maksimal.

Peran pemerintah dalam penanggulangan *stunting* dapat dilihat dari fungsi stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana program. Sebagai stabilisator, pemerintah menjaga stabilitas politik dan sosial yang mendukung keberlanjutan program pencegahan *stunting*. Sebagai inovator, pemerintah memperkenalkan inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak. Peran modernisator tercermin dari upaya modernisasi fasilitas kesehatan, sanitasi, dan edukasi masyarakat. Sebagai pelaksana, pemerintah menunjukkan komitmen tinggi dalam implementasi program intervensi (Muharram, 2024).

Pencegahan *stunting* merupakan langkah krusial dalam menangani akar permasalahan *stunting*, salah satunya melalui edukasi kader kesehatan. Pelatihan kader dapat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui diseminasi informasi terkait pencegahan *stunting* (Vinci et al., 2022). Namun, evaluasi komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan *stunting* terintegrasi di tingkat kecamatan, khususnya yang mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan dan tantangan spesifik di daerah kepulauan, masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi

yang diterapkan di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan *stunting* di konteks daerah kepulauan dengan karakteristik sosial ekonomi yang unik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas kebijakan publik. Secara spesifik, penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan, menganalisis mekanisme koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program, serta mengukur dampak kebijakan terhadap penurunan prevalensi *stunting* di wilayah penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model evaluasi efektivitas kebijakan *stunting* terintegrasi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Nugroho (2017) mengemukakan lima prinsip utama yang harus dipenuhi untuk mencapai efektivitas suatu kebijakan publik. Prinsip pertama adalah ketepatan kebijakan, yang menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memecahkan masalah yang menjadi fokus intervensi. Ketepatan ini mencakup tiga aspek, yaitu sejauh mana kebijakan dirumuskan sesuai dengan karakteristik permasalahan, serta apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan karakteristik kebijakan tersebut.

Prinsip kedua adalah ketepatan pelaksana, yang menekankan bahwa aktor implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada pemerintah

saja. Terdapat tiga model pelaksanaan kebijakan, yaitu pelaksanaan oleh pemerintah secara langsung, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat atau swasta, serta pelaksanaan yang bersifat monopoli oleh pemerintah. Dalam konteks kebijakan yang memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dianjurkan.

Prinsip ketiga adalah ketepatan target, yang meliputi kesesuaian target intervensi dengan rencana kebijakan, menghindari tumpang tindih atau kontradiksi dengan kebijakan lain, serta kesiapan target untuk diintervensi, baik dari aspek alamiah maupun kondisi sosial yang mendukung atau menolak intervensi tersebut.

Prinsip keempat adalah ketepatan lingkungan, yang mencakup dua dimensi penting: lingkungan kebijakan publik, yaitu interaksi antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan, serta lingkungan eksternal yang berada di luar lingkup kebijakan namun dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Prinsip terakhir adalah ketepatan proses, yang secara umum mencakup tiga tahapan utama dalam efektivitas kebijakan publik, yaitu *policy acceptance* (penerimaan kebijakan oleh publik dan pemerintah sebagai aturan dan tugas yang harus dijalankan), *policy adoption* (pengakuan dan penerimaan kebijakan sebagai aturan main untuk masa depan), serta *strategic readiness* (kesiapan publik dan birokrat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut).

Konsep integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan program *stunting*, mengingat permasalahan *stunting* yang bersifat multifaktorial. Menurut Supriyanto & Jannah (2022), integrasi kebijakan *stunting* mencakup koordinasi lintas sektor, sinkronisasi program, dan konvergensi anggaran. Penelitian mereka di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa tingkat integrasi yang tinggi mampu meningkatkan efektivitas program *stunting* hingga 3,2 kali lipat dibandingkan program yang berjalan secara sektoral.

Dengan mengkaji kebijakan intervensi penurunan *stunting* berdasarkan lima prinsip efektivitas kebijakan publik Nugroho (2017) dan mengintegrasikannya dengan temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu di bidang kesehatan masyarakat, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Buton Tengah. Kerangka konseptual ini menjadi landasan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan konteks khusus daerah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa memerlukan pengukuran kuantitatif (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini sesuai untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat kondisi serta proses yang terjadi dalam program penurunan *stunting* di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan kontekstual terkait implementasi kebijakan serta respons pelaku terkait.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang telah berjalan di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan pada periode Januari sampai dengan Juni 2025, dengan pertimbangan waktu yang cukup untuk melakukan observasi mendalam dan wawancara komprehensif terhadap implementasi kebijakan yang telah berjalan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan

penelitian (Sugiyono, 2020). Kriteria informan meliputi: (1) memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait implementasi kebijakan *stunting* di Kecamatan Lakudo; (2) terlibat aktif dalam program penurunan *stunting* baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, maupun penerima manfaat; dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka untuk kepentingan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 8 (delapan) informan yang terdiri dari: Camat Lakudo (1 orang) sebagai koordinator kebijakan di tingkat kecamatan; Kepala Puskesmas dan staf medis (2 orang) sebagai pelaksana program kesehatan; kader posyandu (2 orang) sebagai ujung tombak implementasi di masyarakat; Kepala Desa (1 orang) sebagai koordinator program di tingkat desa; dan ibu-ibu penerima program (2 orang) sebagai sasaran kebijakan. Pemilihan jumlah dan komposisi informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai tingkatan implementasi kebijakan, mulai dari level pengambil kebijakan hingga masyarakat penerima manfaat program.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program *stunting* di posyandu dan fasilitas kesehatan; wawancara mendalam dengan 8 informan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan durasi 45-60 menit per informan; serta dokumentasi berupa pengumpulan dokumen kebijakan, laporan program, dan data statistik *stunting*. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021) melalui tiga tahap: reduksi data untuk memfokuskan informasi penting, penyajian data dalam bentuk matriks dan *chart*, serta penarikan kesimpulan secara interaktif hingga mencapai kejenuhan data. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi metode (menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengumpulan data pada waktu yang berbeda)

untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Kebijakan

Efektivitas kebijakan pada indikator ketepatan kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dan diperlukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Riant Nugroho, 2017). Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang intervensi penurunan *stunting* merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mengatasi isu *stunting* yang sebelumnya kurang mendapat prioritas di daerah tersebut.

Tabel 1. Prevalensi Stunting 2021-2024 Berdasarkan Data e_PPGBM Kabupaten Buton Tengah

No	Tahun	Data Ukur	Jumlah Stunting	% Stunting
1	2021	6927	1621	23,5
2	2022	8091	1803	22,4
3	2023	9039	1569	15,7
4	2024	9726	1400	14,4

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah (2025)

Data menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* yang signifikan dari 23,5% pada tahun 2021 menjadi 14,4% pada tahun 2024, dengan total penurunan sebesar 9,1 poin persentase. Penurunan paling signifikan terjadi antara 2022-2023 (6,7 poin), mengindikasikan efektivitas program yang mulai optimal pada tahun kedua implementasi. Capaian 14,4% pada 2024 telah mencapai target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 14%, menunjukkan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan lokal.

Keberhasilan ini mencerminkan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan strategi nasional melalui lima pilar pencegahan *stunting*, tidak hanya menitikberatkan pada aspek medis dan kesehatan, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan adanya sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat,

dan ketahanan pangan yang memberikan dampak positif dalam pengurangan angka *stunting*.

Ketepatan Pelaksana

Implementasi kebijakan intervensi penurunan *stunting* di Kabupaten Buton Tengah melibatkan berbagai aktor yang bekerja secara terpadu. Pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh Dinas Kesehatan, puskesmas, kader posyandu di Kecamatan Lakudo, serta dukungan lintas sektor dari Bappeda dan Dinas Sosial. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan model pelaksanaan yang melibatkan pemerintah bersama masyarakat dan institusi terkait, sesuai dengan prinsip efektivitas kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan (Riant Nugroho, 2017).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Sabaruddin, dkk (2023) yang menyatakan bahwa terkait pendekatan *governance network*, koordinasi, kepemimpinan, dan komitmen adalah elemen kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan yang melibatkan *multi-stakeholder*. Ketiga elemen tersebut terbukti menjadi fondasi keberhasilan implementasi kebijakan *stunting* di Kecamatan Lakudo, di mana koordinasi terwujud melalui model *triangle coordination* yang menghubungkan koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal; kepemimpinan tercermin dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mengeluarkan Peraturan Bupati dan memastikan implementasi yang konsisten; serta komitmen yang terbukti dari alokasi anggaran khusus, pembentukan tim lintas sektor, dan keberlanjutan program selama periode implementasi yang menghasilkan penurunan *stunting* sebesar 9,1 poin persentase.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati mengakomodasi dua jenis intervensi: spesifik dan sensitif. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi mengenai bahaya *stunting*, penyuluhan gizi bagi keluarga terdampak, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan tumbuh kembang balita telah dilaksanakan secara berkesinambungan.

Meskipun pelaksanaan kebijakan menunjukkan hasil positif, koordinasi antarsektor masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi data dan sinkronisasi program. Ketidaksesuaian data dan perbedaan standar pelaporan dapat menghambat kelancaran komunikasi dan kolaborasi antar lembaga. Hal ini konsisten dengan temuan Supriyanto & Jannah (2022) yang mengidentifikasi rendahnya tingkat integrasi kebijakan sebagai hambatan utama program *stunting*.

Ketepatan Target

Ketepatan target merupakan prinsip krusial yang memastikan program dan bantuan menysasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan intervensi penurunan *stunting* di Kabupaten Buton Tengah secara eksplisit menargetkan kelompok rentan seperti balita, baduta (bayi dua tahun), ibu hamil, dan ibu menyusui, sejalan dengan pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan yang telah terbukti efektif secara teoritis maupun praktis.

Tabel 2. Target Sasaran Sesuai Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan Stunting

No	Target Indikator Utama Dalam Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi
1	Prevalensi <i>stunting</i> pada anak baduta dan balita
2	Persentasi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
3	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita
4	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita
5	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
6	Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri
7	Prevalensi kecacangan pada anak balita
8	Prevalensi diare pada anak baduta dan balita

Sumber: Peraturan bupati Buton Tengah (2025)

Penentuan target yang tepat terbukti efektif dalam mencapai penurunan *stunting* yang signifikan. Fokus pada kelompok 1000 HPK

menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap periode kritis perkembangan anak. Data e-PPGBM menunjukkan peningkatan jumlah balita yang menerima intervensi gizi dan pemantauan tumbuh kembang secara bertahap setiap tahunnya. Namun, tantangan signifikan masih muncul terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran intervensi secara optimal.

Tepat Lingkungan

Indikator ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal (lingkungan kebijakan) dan lingkungan eksternal (masyarakat), yang keduanya memengaruhi efektivitas implementasi program stunting.

a. Lingkungan Kebijakan internal

Lingkungan kebijakan mencerminkan dinamika hubungan dan koordinasi antara lembaga perumus kebijakan (Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah) dengan pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan dan desa. Penelitian menunjukkan adanya kerja sama yang baik melalui mekanisme pemantauan berkelanjutan dan pelaporan bulanan. Dinas Kesehatan secara aktif memonitor angka stunting, melakukan pelacakan, dan konfirmasi terhadap kasus-kasus *stunting* yang meningkat.

Sistem yang responsif dan terintegrasi ini memungkinkan penanganan langsung di lapangan. Ketika ditemukan kasus baru, Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan pengukuran ulang tetapi juga wawancara mendalam untuk mengidentifikasi penyebabnya. Kondisi ini menunjukkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal meliputi persepsi publik dan opini masyarakat terhadap kebijakan intervensi penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman

masyarakat mengenai bahaya *stunting* masih tergolong terbatas pada awal implementasi kebijakan. Banyak masyarakat baru menyadari pentingnya penanganan *stunting* setelah mengalami pemeriksaan atau intervensi langsung.

Namun, terjadi perubahan positif dalam kesadaran masyarakat seiring berjalannya program. Perubahan sikap masyarakat menunjukkan bahwa dukungan dan kesadaran publik dapat memperkuat implementasi kebijakan. Meskipun terdapat keterbatasan pemahaman awal, masyarakat di Kabupaten Buton Tengah mulai menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah gizi, yang merupakan perkembangan positif dalam lingkungan eksternal kebijakan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan program penyuluhan gizi menunjukkan adaptasi yang baik terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Ketepatan Proses

Aspek ketepatan proses merupakan rangkaian pelaksanaan yang mengubah rencana menjadi pencapaian tujuan, melibatkan individu maupun kelompok dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menilai ketepatan proses melalui tiga tahap utama:

a. Penerimaan Kebijakan (*Policy Acceptance*)

Proses penerimaan kebijakan menunjukkan adanya persiapan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah memiliki pengalaman dalam menangani masalah gizi, dan kebijakan ini memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas intervensi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif. Tingkat penerimaan kebijakan tergolong tinggi, terlihat dari komitmen pemerintah daerah dan alokasi anggaran khusus untuk program *stunting*.

b. Adaptasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tahap adaptasi menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap masalah gizi. Sosialisasi pemerintah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun terdapat hambatan seperti ketakutan untuk mengunjungi puskesmas dan kendala ekonomi yang masih menjadi tantangan, khususnya di Kecamatan Lakudo. Masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan pola hidup sehat, meskipun masih ada resistensi terhadap perubahan pola makan tradisional.

c. Kesiapan Strategis (*Strategic Readiness*)

Tahap kesiapan strategis menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat mulai menyadari urgensi pencegahan *stunting* sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup. Namun, kesiapan strategis dalam pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal, terlihat dari masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif dan pemanfaatan posyandu sebagai pusat layanan gizi anak.

Sinergi antara Dinas Kesehatan, Sosial, dan Bappeda menjadi faktor paling menentukan efektivitas program. Koordinasi ini terwujud melalui rapat koordinasi bulanan, integrasi perencanaan program. Model koordinasi yang berkembang membentuk "*triangle coordination*" yang terdiri dari: (1) koordinasi vertikal antara pusat-daerah-desa melalui hierarki administratif, (2) koordinasi horizontal lintas OPD melalui *task force* terintegrasi, dan (3) koordinasi diagonal antara pemerintah-masyarakat-kader melalui pemberdayaan *grassroots*. Model ini memungkinkan penanganan *stunting* dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penggunaan e_PPGBM sebagai sistem informasi terintegrasi memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap kasus *stunting*. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme *adaptive governance* yang memfasilitasi penyesuaian program secara

responsif berdasarkan data lapangan. Sistem *monitoring real-time* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai instrumen manajemen kinerja yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini memungkinkan identifikasi area berisiko tinggi dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Kader posyandu berperan sentral sebagai "*street-level bureaucrat*" dalam implementasi di tingkat *grassroots*. Mereka tidak hanya melakukan pengukuran antropometri, tetapi juga menjadi agen edukasi gizi dan pendamping keluarga. Temuan ini mendukung penelitian Vinci et al. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan kader dapat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui diseminasi informasi terkait pencegahan *stunting*.

Pemberdayaan kader mencakup peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkala, penyediaan alat ukur yang memadai, dan sistem insentif yang memotivasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses geografis.

Meskipun menunjukkan keberhasilan signifikan, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan strategis. Pertama, integrasi data lintas sektor masih terkendala oleh perbedaan standar pelaporan dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terkoneksi. Hal ini sejalan dengan temuan Supriyanto & Jannah (2022) yang mengidentifikasi rendahnya tingkat integrasi kebijakan sebagai hambatan utama program *stunting*. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap praktik ASI eksklusif masih rendah, yang menjadi salah satu indikator kunci dalam Peraturan Bupati. Ketiga, karakteristik geografis kepulauan memberikan tantangan akses dan distribusi layanan yang memerlukan pendekatan adaptif.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks teoritis dan praktis administrasi publik. Secara teoretis, penelitian memvalidasi teori efektivitas kebijakan publik Nugroho (2017) dengan mengidentifikasi hierarki faktor efektivitas, di mana ketepatan pelaksana (koordinasi lintas sektor) menjadi

determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan multisektoral.

Temuan ini memberikan perspektif baru dalam literatur administrasi publik. Hal ini menantang asumsi konvensional bahwa keberhasilan program pemerintah selalu bergantung pada besaran anggaran, dan menekankan pentingnya faktor organisasional dalam implementasi kebijakan kompleks.

Kolaborasi antar kader *stunting* merupakan kunci efektivitas program pencegahan *stunting*, yang dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu kepercayaan, komunikasi, kesepakatan, dan persepsi manfaat. Penguatan faktor-faktor ini melalui pelatihan, saluran komunikasi yang jelas, dan sistem insentif dapat meningkatkan kerja sama tim dan mengoptimalkan hasil program pencegahan *stunting* (Putri, 2024)

Secara praktis, model "*triangle coordination*" yang teridentifikasi dapat menjadi rujukan bagi implementasi kebijakan serupa di daerah kepulauan lainnya. Model ini menekankan pentingnya: (1) sinergi kelembagaan sebagai determinan utama efektivitas, (2) sistem *monitoring* adaptif yang responsif terhadap kondisi lokal, dan (3) pemberdayaan aktor *grassroots* dalam implementasi kebijakan kesehatan.

Keunggulan implementasi di Buton Tengah terletak pada adaptasi program terhadap karakteristik kepulauan dan penguatan peran kader sebagai *street-level bureaucrat*. Model ini dapat menjadi referensi bagi daerah kepulauan lainnya yang menghadapi tantangan geografis serupa dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat.

Dibandingkan dengan implementasi di wilayah daratan, program *stunting* di Buton Tengah menunjukkan inovasi dalam hal: (1) sistem rujukan yang adaptif terhadap keterbatasan transportasi, (2) penguatan kapasitas kader lokal untuk mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan profesional, dan (3) pendekatan komunikasi yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dalam edukasi gizi.

Efektivitas kebijakan intervensi penurunan *stunting* di Kecamatan Lakudo menunjukkan keberhasilan implementasi berdasarkan lima prinsip efektivitas kebijakan publik, dengan koordinasi lintas sektor, sistem *monitoring* berbasis data *real-time*, dan pemberdayaan kader sebagai faktor kunci yang menentukan pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* dari 23,5% menjadi 14,4%. Model "*triangle coordination*" yang teridentifikasi memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan *governance network* dan praktis pada replikasi kebijakan multisektoral di daerah kepulauan dengan karakteristik serupa.

Meskipun menghadapi tantangan dalam integrasi data lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ASI eksklusif, kebijakan ini berhasil menciptakan sinergi kelembagaan yang efektif dalam penanganan *stunting*. Temuan bahwa efektivitas kebijakan lebih bergantung pada kualitas koordinasi daripada ketersediaan anggaran memberikan perspektif baru dalam literatur administrasi publik dan memperkaya konsep *new public governance* dalam konteks desentralisasi Indonesia. Penguatan mekanisme *monitoring*, evaluasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas intervensi penurunan *stunting* di masa mendatang.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan tiga *insight* baru dalam implementasi kebijakan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Pertama, efektivitas kebijakan *stunting* lebih ditentukan oleh kualitas sinergi kelembagaan daripada ketersediaan anggaran, menantang asumsi konvensional dalam administrasi publik bahwa keberhasilan program selalu bergantung pada besaran anggaran. Kedua, teridentifikasi model "*triangle coordination*" yang terdiri dari: (1) koordinasi vertikal antara pusat-daerah-desa melalui hierarki administratif, (2) koordinasi

horizontal lintas OPD (Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial) melalui *task force* terintegrasi, dan (3) koordinasi diagonal antara pemerintah-masyarakat-kader melalui pemberdayaan *grassroots*. Model ini terbukti mampu menurunkan prevalensi stunting hingga 9,1 poin persentase dalam tiga tahun. Ketiga, sistem monitoring berbasis data *real-time* (e_PPGBM) berfungsi sebagai mekanisme *adaptive governance* yang memungkinkan penyesuaian kebijakan secara responsif terhadap dinamika lokal.

Temuan ini signifikan dalam konteks administrasi publik karena memvalidasi dan memperkaya teori efektivitas kebijakan Nugroho (2017) dengan mengidentifikasi hierarki faktor efektivitas, mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan terintegrasi berbasis pendekatan kualitatif mendalam, dan menghasilkan *best practice* implementasi untuk daerah kepulauan. Model *triangle coordination* memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan *governance network* dan praktis pada replikasi kebijakan multisektoral di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi serupa, memperkaya literatur *new public governance* dalam konteks desentralisasi Indonesia.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press All right reserved.
- Firdaus, F., Ahmad, S., Akhyar, A., & Haeril, H. (2024). Efektivitas Program Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Prevalensi Stunting di Kabupaten Bima. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 366–376.
- Muharram, F. (2024). Efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 379–391.
- Nisa, L. S. (2018). Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Nurak, A., Andayani, L., & Sahriani, S. (2023). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3803–3809.
- Poeh, M. H., & Tandean, N. R. P. (2024). *EFEKTIFITAS PROGRAM PENANGANAN STUNTING MENUJU BONUS DEMOGRAFI DI KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. IPDN.
- Purba, S. H. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, D. U. P. (2024). Factors related to the collaboration of cadres in stunting prevention. *African Journal of Reproductive Health*, 28(10), 111–117.
- Riant Nugroho. (2017). *PUBLIC POLICY*. PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
- Riyadh, N. A., Batara, A. S., & Nurlinda, A. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 1–17.
- Sabaruddin, A., Firdaus, F., & Fait, T. (2023). Health services viewed from network governance perspective in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. *Sosiohumaniora*, 25(3), 488–500.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Alfabeta.
- Supriyanto, A., & Jannah, L. M. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2).
- Susilawati, N. hendra pratama. (2023). Literature Review: Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan. *Miracle Journal*, 3(2), 33–37.
- Vinci, A. S., Bachtiar, A., & Parahita, I. G. (2022). Efektivitas edukasi mengenai pencegahan stunting kepada kader: Systematic literature review. *Jurnal Endurance*, 7(1), 66–73.